Postur Kebijakan Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea

Arya Damarjana – 070912053

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

As a country, Indonesia has the so-called border states of Indonesia as its sovereign boundaries. Border is an area that is prone to conflict and allusions and political security for neighboring countries. In last couple of years (2002-2012) there were three boundary problems between Indonesia and Malaysia, the problems that led to tensions between the two countries. On the other hand, border issues between Indonesia and PNG that affect the bilateral relations of the two countries are not well recorded. Historically, OPM separatist movements were once recorded to pose a threat to the security of Indonesia. Threats are increasing especially when OPM uses cross-border access in the Indonesia - PNG borders. This study focuses on how the Indonesian border policy posture seen from the border case of Indonesia - Papua New Guinea.

Keywords: *Border, Policy, Border Policy Posture, Conventional and Non-Conventional Security.*

Indonesia sebagai sebuah negara memiliki batas-batas terhadap kedaulatannya yang disebut perbatasan negara Indonesia. Perbatasan merupakan daerah yang rawan konflik dan singgungan-singgungan keamanan dan politik bagi negara yang bertetangga. Dalam beberapa tahun terakhir (2002-2012) tercatat ada tiga permasalahan batas antara Indonesia dengan Malaysia, permasalahan yang sempat menimbulkan ketegangan antara kedua negara ini. Tetapi di lain sisi secara umum tidak tercatat bagaimana masalah-masalah perbatasan yang berpengaruh terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Papua New Guinea terutama di wilayah perbatasannya. Dalam sejarahnya, pernah tercatat terdapat gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka yang menjadi ancaman bagi keamanan bagi negara Indonesia. Ancaman keamanan meningkat terutama ketika mobilitas gerakan ini menggunakan akses lintas batas perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana postur kebijakan perbatasan Indonesia dilihat dari perbatasan Indonesia – Papua New Guinea.

Kata-Kata Kunci: *Perbatasan, Kebijakan, Postur Kebijakan Perbatasan, Keamanan Konvensional dan Non-Konvensional*

Perbatasan adalah istilah yang dekat dengan konsep negara, dimana negara sebagai suatu unit spasial yang berdaulat (atau otonom) antara satu dengan yang lain. Semenjak hukum adat/suku bertransisi menjadi hukum wilayah pada perspektif status kenegaraan, keduanya memiliki pandangan dasar yang sama, yaitu; wilayah, warga, pemerintahan yang secara efektif mengontrol internal, bebas secara eksternal, dan bersedia dan mampu menanggung kewajibannya dibawah aturan dan hukum internasional (atau federal). Kedaulatan adalah wilayah, dimana suatu negara harus memiliki batas-batas tertentu dan wilayah yang secara eksklusif yurisdiksi dibatasi oleh batas-batas negara. Perbatasan mengikat bersama-sama wilayah dan orang-orang yang hidup dibawah satu pemerintahan yang berdaulat, hukum, dan setidaknya tidak hanya terintegrasi secara administratif dan ekonomi tetapi juga ide terhadap negara itu sendiri. Jadi negara dalam hal ini merupakan instrumen utama yang bertanggung jawab terhadap perbatasan yang mengikat kedaulatannya. Hal ini tidak dapat lepas dari perjanjian Westphalia yang menjadi titik awal bentuk “negara” itu sendiri. Dimana dalam kedaulatan suatu negara tidak akan lepas dari konsep nasionalisme dan perbatasan itu sendiri yang dianggap sudah merupakan *given* dari awal mulanya.

Perbatasan merupakan wilayah pertemuan bagi dua atau lebih negara sebagai batas kedaulatan masing-masing negara. Dimana letak geografis perbatasan ini sering menimbulkan singgungan baik dalam aspek sosial-kultural, politik dan ekonomi antara kedua negara yang bersangkutan. Didunia internasional, permasalahan perbatasan sering menimbulkan sensitifitas dan konflik bagi hubungan negara-negara didunia. Ketidakjelasan terhadap kedaulatan negara yang dilihat dari batas antara dua negara dapat dilihat dari kasus antara Israel dan Palestina yang pada dasarnya dimulai akibat lalu lintas imigran Yahudi (Israel) didaerah kedaulatan Palestina. Kasus ini mengakibatkan perang beberapa negara Timur Tengah dengan Israel akibat permasalahan ini pada tahun 1948. Dalam perjalanan penyelesaian permasalahan ini ditingkat internasional ternyata permasalahan ini dianggap sebagai masalah yang dimulai dari ketidakjelasan batasan-batasan antara dua negara Israel dan Palestina.

Contoh lain permasalahan perbatasan ini seperti korban perang saudara antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Meningkatnya tensi konflik kedua negara ini sering dimulai dari genjatan senjata yang sering menimbulkan korban didaerah perbatasan kedua negara ini. Tidak hanya batas daratan melainkan pelanggaran lintas-batas patroli keamanan di daerah batas laut yang menyebabkan genjatan senjata bagi kedua negara. Permasalahan lain juga terjadi diantara Thailand dengan Kamboja mengenai perebutan Temple of Preah Vihear. Dimana candi yang diperebutkan ini berdiri didaerah perbatasan antara batas negara

Thailand dengan Kamboja yang mengakibatkan sensitifitas hubungan yang meninggi diantara kedua negara ini dan yang pada akhirnya diangkat ke Mahkamah Internasional. Contoh lainnya adalah perang India dengan Pakistan yang dimulai dari konflik etnis lintas-batas pada tahun 1965.

Indonesia sendiri pada dasarnya merupakan sebuah negara yang juga berbatasan langsung dengan banyak negara lain. Indonesia memiliki beberapa negara tetangga yang berbatasan secara langsung dengan Indonesia seperti Malaysia, Timor Leste, dan Papua New Guinea (selanjutnya digunakan PNG). Menurut Haryati, semakin banyak suatu negara berbatasan dengan negara lain maka semakin kompleks permasalahan vicinal yang dihadapi.

Di Indonesia sendiri dalam 10 tahun akhir ini (2002-2012) setidaknya ada 3 masalah konflik perbatasan dengan negara tetangga yang dialami oleh Indonesia yaitu: 1) Pada tahun 2002, konflik antara Indonesia dan Malaysia tentang perebutan hak kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan. Tanggal 17 Desember 2002, keputusan Mahkamah Internasional yang memutuskan bahwa hak kepemilikan terhadap kedua pulau ini jatuh ditangan Malaysia. Keputusan ini meningkatkan tensi hubungan antara dengan Indonesia dan Malaysia. Megawati yang kala itu menjabat sebagai Presiden dan Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirayuda gagal mempertahankan kedua pulau tersebut. 2) Pada tahun 2009, Malaysia mengklaim blok Ambalat dengan memberi izin untuk eksplorasi pertambangan kepada PT. Petronas dan PT. Shell. Hal ini menjadi permasalahan serius ketika patroli militer Indonesia bersengketa dengan patrol militer Malaysia. Hal ini sempat menimbulkan hubungan diplomatik yang memanas antara Indonesia dan Malaysia. 3) Pada tahun 2011, Polisi Indonesia menangkap beberapa nelayan Malaysia yang melanggar perbatasan negara. Pada tanggal 18 Mei 2011, Indonesia dan Malaysia melakukan rapat yang membahas tentang penyelesaian pelanggaran perbatasan ini dan untuk mencari solusi terhadap masalah konflik perbatasan yang terjadi antara kedua negara ini.

Bila ditinjau secara lebih dalam, bahwa permasalahan perbatasan kontemporer ini tidak hanya merujuk pada isu-isu konvensional. Permasalahan keamanan perbatasan konvensional dalam artian seperti klaim negara terhadap wilayah negara lain atau permasalahan batas yang tidak jelas. Perkembangan ini membawa tinjauan terhadap permasalahan perbatasan kearah yang non konvensional seperti faktor-faktor non-teknis dan lebih merujuk kepada individu bukan semata instansi pemerintah. Permasalahan non-konvensional ini sering menimbulkan guncangan terhadap kesejahteraan sosial terutama didaerah-daerah perbatasan. Globalisasi membawa keterbukaan pintu

masuk negara-negara didunia. Dimana gerakan ekonomi global yang bergerak lebih bebas dan lebih liberal dalam hal ini tidak hanya memfasilitasi pergerakan barang produksi dan pekerja, tetapi hal ini juga yang mempercepat gerakan teroris, senjata kecil, obat-obat terlarang, imigran gelap dan penyakit. Semakin besar pergerakan di daerah perbatasan ini maka harus semakin banyak pula agen dan pasukan keamanan perbatasan didalamnya. Hal ini tergantung bagaimana pemerintah suatu negara dalam mengelola wilayahnya. Sehingga perlu ditinjau kembali bagaimana secara lebih mendalam bagaimana permasalahan perbatasan di Indonesia.

Yang menarik adalah ketika dari permasalahan perbatasan Indonesia dalam 10 tahun terakhir diatas tidak tercatat secara umum bagaimana kondisi perbatasan Indonesia dengan PNG di daerah Papua. Dimana pernah tercatat muncul gerakan separatis yang bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dalam sejarahnya menginginkan kebebasan terhadap Papua Barat dari pemerintah Republik Indonesia yang muncul semenjak tahun 1965. Gerakan separatis merupakan salah satu ancaman bagi sebuah negara terutama mengingat bentuk kelompok ini merupakan kelompok yang sering melanggar lintas-batas negara. Kemunculan gerakan separatis ini salah satunya disebabkan oleh kepaduan pemerintah pusat dan daerah yang jauh. Tercatat pada tanggal 1 Mei 2008 eksistensi gerakan separatis ini masih aktif ketika peringatan kembalinya Papua ke tangan Indonesia ada dua tempat wilayah Jayapura yang menjadi tempat pengibaran bendera Bintang Kejora yaitu di tiang rektorat Kampus Universitas Cendrawasih dan di Kantor Kelurahan Yabansoi, Distrik Harem. Dari pihak Departemen Luar Negeri Kasubdit Kewilayahan Haris Nugroho (2008) mengatakan bahwa didaerah Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Merauke, Papua sangat rawan menjadi basis gerakan separatis OPM. Letak wilayah pedalaman ini sangat sulit dikontrol pemerintah sehingga masih muncul kekhawatiran terhadap aktifitas lintas batas mereka. Tercatat gerakan OPM ini pernah memanfaatkan perbatasan laut di selatan Kabupaten Merauke untuk menyebrang ke negara Australia. Hal ini jelas bukan merupakan hal dapat disepelekan bagi suatu negara untuk menjadi perhatian utama, terutama hal ini berkaitan dengan kestabilisasian kedaulatan kedua negara tetangga ini. Walaupun dalam perjalanannya belum pernah ada sengketa-sengketa dan permasalahan yang sensitive antara pemerintah Indonesia dengan PNG.

Beberapa masalah seperti gerakan separatis dan beberapa hal lainnya, mampu menciptakan goncangan nasional dan goncangan hubungan bilateral suatu negara terutama ketika permasalahan yang datang dari internal menciptakan singgungan terhadap negara tetangga. Maka dibutuhkan kontrol dan koordinasi yang tepat dari sistem pemerintahan dalam pengelolaan keamanan perbatasan. Hal ini tidak dapat lepas dari

bagaimana kebijakan pemerintah dari setiap negara terhadap masalah-masalah perbatasan yang datang dari faktor eksternal maupun internal. Bila dilihat dari latar belakang masalah diatas, bagaimanakah postur kebijakan perbatasan Indonesia bila dilihat dari kebijakannya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada diperbatasan antara negara Indonesia dengan negara Papua New Guinea?

Identifikasi Permasalahan Perbatasan Secara Umum Indonesia – PNG

Pada dasarnya wilayah Papua merupakan warisan kolonial, baik dari pihak Indonesia maupun PNG. Wilayah kedaulatan Indonesia yang meliputi warisan dari Belanda dan wilayah kedaulatan PNG merupakan warisan dari Inggris. Hubungan kedua negara ini tercatat tidak pernah terjadi genjatan senjata secara besar-besaran yang mengakibatkan hubungan politik yang memanas. Tercatat bahwa dari Pemerintah Indonesia sendiri menganggap sudah tidak ada permasalahan yang serius didaerah perbatasan Papua dan lebih mengutamakan kerjasama dalam mengatasi masalah perbatasan secara bersama. Sedangkan dari pihak PNG sendiri, kerjasama antar-pemerintah kedua negara menjadi prioritas dalam menjaga keamanan perbatasan bersama. PNG pada dasarnya bergantung kepada inisiatif Pemerintah Indonesia dalam menjaga dan mengelola perbatasan kedua negara ini.

Masalah perbatasan yang selama ini menjadi kendala menurut pihak PNG adalah lalu lintas batas. Dalam beberapa kasus tercatat kasus lintas batas merupakan masalah yang masih sulit diatasi baik dari level pemerintahan hingga individu. Tetapi dalam pelaksanaannya, kerjasama kedua negara berjalan cukup baik terutama bila dilihat dari perjanjian-perjanjian bilateral yang berlangsung dan kerjasama dalam tingkat lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan kebijakan di daerah perbatasan. Kondisi perbatasan Indonesia dan PNG lebih didominasi permasalahan pada tingkat ancaman non-konvensional. Seperti kejahatan lalu lintas batas, penyelundupan atau gerakan separatis. Permasalahan perbatasan di daerah Papua ini terjadi karena jauhnya kontrol pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masih buruknya pengelolaan perbatasan bila dilihat dari sudut pandang Indonesia. Masyarakat perbatasan Papua antara Indonesia – PNG secara umum masih terikat dalam satu rumpun, suku dan keluarga. Sehingga dalam pengelolaannya, pemerintah kedua negara juga menerapkan fasilitas lintas batas tradisional agar mobilitas dan hubungan masyarakat tradisional (keterikatan ethnik) didalamnya masih tetap terjaga.

Dalam pelaksanaan kebijakan perbatasannya, Indonesia dan PNG mengutamakan hubungan kerjasama. Dilihat dari penempatan pasukan penjaga keamanan yang dilakukan oleh Indonesia, jumlahnya relatif sedikit dan tidak terlalu ketat penjagaannya. Masih tercatat banyaknya kegiatan ilegal pelintas batas dan tidak adanya tindak lanjut permasalahan ini dengan alasan belum adanya koordinasi dan payung aturan yang jelas. Hal ini menjadi gambaran secara umum bahwa dengan adanya perjanjian-perjanjian dan kerjasama bilateral yang diterapkan kedua negara ini, dalam pelaksanaannya belum dapat dikatakan maksimal. Terutama masih banyaknya kasus dan data-data terhadap pelanggaran di perbatasan yang belum teridentifikasi dengan baik oleh kedua pemerintah ini.

Model dan Rezim Perbatasan Pada Umumnya

Dengan merujuk kepada perspektif-perspektif yang disajikan penulis, maka dalam meninjau permasalahan perbatasan Indonesia –PNG penulis membagi model dan rezim perbatasan sebagai berikut,

Tabel 1. Postur Kebijakan Perbatasan Negara

No.	Penulis	Pilihan Postur	Variabel Pembeda
1.	Rennie	<i>Stable boundaries</i> dan <i>unstable boundaries</i>	Sejarah geografis dan perubahan geopolitik
2.	Martinez	<i>Alienated borderland, coexistent borderland, interdependent borderland, dan integrated borderland</i>	Kondisi dan aktifitas daerah perbatasan
3.	Prescott	<i>Positional dispute, territorial dispute, functional dispute, dan transboundary resource dispute</i>	Karakter konflik
4.	Wuryandari	<i>Hard-border regime</i> dan <i>soft-border regime</i>	Integrasi keamanan
5.	Marc	Fungsi militer – strategis, fungsi ekonomi, fungsi konstitutif, fungsi identitas	Fungsional

		nasional, fungsi persatuan nasional, fungsi pembangunan negara-bangsa, dan fungsi pencapaian kepentingan domestik	
--	--	---	--

Kondisi Perbatasan

Dalam mengidentifikasi masalah perbatasan, maka penting halnya untuk melihat bagaimana kondisi perbatasan yang menjadi objek penelitian. Merujuk pada pandangan Rennie, kondisi perbatasan dibagi menjadi dua yaitu *stable boundaries* dan *unstable boundaries*. Peneliti melihat tolak ukur kondisi perbatasan dilihat dari sejarah geografis dan perubahan geopolitik dari perbatasan itu sendiri. *Stable boundaries* pada dasarnya merupakan kondisi perbatasan yang stabil dan tidak banyak mengalami perubahan kondisi geografis batas negara yang signifikan. Sebaliknya, *unstable boundaries* merupakan kondisi perbatasan yang relatif tidak stabil dan sering mengalami perubahan geografis. Dilihat dari sejarahnya, kondisi batas negara sering mengalami perubahan geopolitik. Sehingga kedaulatan negara yang kondisi perbatasannya termasuk *unstable boundaries* ini sering berubah-ubah pula.

Tipe Perbatasan

Setiap perbatasan di dunia selalu memiliki bentuk aktifitas yang berbeda-beda dalam keberlangsungannya. Merujuk pada pandangan O.J. Martinez, tipe perbatasan dikategorikan kedalam empat tipe yaitu *alienated borderland*, *coexistent borderland*, *interdependent borderland*, dan *integrated borderland*. *Alienated borderland*, merupakan tipe perbatasan yang kondisi dan aktifitas perbatasannya sangat pasif seperti akibat negara yang sedang konflik dengan negara tetangganya. *Coexistent borderland*, merupakan tipe perbatasan yang permasalahan-permasalahan di dalamnya masih bisa ditekan dan jarang menimbulkan konflik yang besar. yang bisa dikategorikan kedalam tipe ini. *Interdependent borderland*, merupakan tipe perbatasan yang dalam hubungan internasionalnya relatif stabil. Dan yang terakhir adalah *integrated borderland*, yaitu daerah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan. Biasanya, tipe perbatasan ini ditunjukkan oleh nasionalisme di daerah perbatasan yang cukup menyurut. Peneliti melihat hal ini dikarenakan kurang baiknya pengelolaan pemerintah suatu negara dalam mengelola dan menjaga keamanan perbatasan.

Peneliti melihat kondisi dan aktifitas di daerah perbatasan sebagai tolak ukur bagaimana perbatasan negara digolongkan kedalam tipe-tipe perbatasan. Kondisi dan aktifitas di daerah perbatasan dapat berupa hubungan kedua negara yang berbatasan atau aktifitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat didalamnya.

Karakteristik Sengketa Perbatasan

Perbatasan merupakan daerah yang rawan terhadap singgungan-singgungan kepentingan setiap negara yang bertetangga. Permasalahan ketidakjelasan garis batas, monopoli sumber daya alam, penyelundupan barang ilegal, atau seperti genjatan senjata akibat pelanggaran lalu lintas batas mewarnai kehidupan di perbatasan. Merujuk pada Prescott, sengketa-sengketa yang terjadi di daerah perbatasan dikategorikan menjadi macam empat yaitu positional dispute, territorial dispute, functional dispute, dan transboundary resource dispute.

Positional dispute merupakan sengketa yang terjadi akibat adanya perbedaan interpretasi mengenai dokumen-dokumen legal atau adanya perubahan di lokasi berupa perubahan tanda-tanda fisik yang dipakai sebagai tanda-tanda batas. Territorial Dispute, merupakan sengketa yang terjadi ketika dua atau lebih negara mengklaim satu wilayah yang sama sebagai wilayahnya atau bagian dari wilayahnya. Functional Dispute, merupakan sengketa yang terjadi akibat adanya pergerakan orang-orang dan barang-barang di daerah perbatasan secara ilegal karena yang tidak dijaga terlalu ketat seperti penyelundupan barang-barang narkoba, senjata, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah Transboundary Resource Dispute, merupakan sengketa yang muncul karena adanya eksploitasi sumber daya alam oleh negara lain dan merugikan negara lain di perbatasan.

Dalam pengkategorian sengketa-sengketa ini, peneliti menarik karakter konflik negara-negara yang berbatasan sebagai tolak ukur dalam melihat kategori sengketa manakah yang ada dalam perbatasan di Papua.

Rezim Keamanan Perbatasan

Merujuk pada Wuryandari, setiap negara yang berbatasan selalu dipengaruhi oleh rezim keamanan perbatasan yang berkembang di dunia. Dalam hal ini, Wuryandari melihat rezim keamanan perbatasan dalam dua bentuk, yaitu hard-border regime dan soft-border regime. Hard-Border Security Regime, yaitu rezim keamanan perbatasan yang menganut sistem perbatasan sangat ketat dengan penempatan pasukan bersenjata lengkap disetiap pos-pos perbatasan. Soft-Border Security Regime, yaitu rezim keamanan perbatasan yang menganut sistem perbatasan yang tidak terlampaui ketat. Biasanya negara penganut

sistem ini tidak secara ketat membatasi pelintas batas antar negara karena negara ini tidak menganggap hal ini sebagai sebuah ancaman bagi keamanan nasionalnya. Peneliti melihat perbedaan kedua bentuk rezim ini dari integrasi keamanan yang terjadi di daerah perbatasan.

Fungsi Perbatasan

Setiap negara memiliki hak dan kewajiban secara penuh terhadap segala hal yang terjadi di wilayahnya, termasuk wilayah perbatasan. Merujuk pada Jean Marc, setidaknya perbatasan memiliki tujuh macam fungsi yaitu fungsi militer – strategis, fungsi ekonomi, fungsi konstitutif, fungsi identitas nasional, fungsi persatuan nasional, fungsi pembangunan negara-bangsa, dan fungsi pencapaian kepentingan domestik. Fungsi perbatasan dalam penelitian ini berguna untuk meninjau bagaimana sudut pandang suatu negara dalam melihat fungsi perbatasannya.

Pertama, Fungsi Militer – Strategis, perbatasan berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan militer-strategis suatu negara, terutama membangun sistem pertahanan laut, udara dan darat untuk menjaga dari ancaman eksternal; Kedua, Fungsi Ekonomi, perbatasan berfungsi sebagai penetapan wilayah tertentu dimana suatu negara dapat melakukan kontrol terhadap arus modal, perdagangan antar-negara, investasi asing, pergerakan barang antar-negara. Fungsi Ekonomi ini juga memberikan patokan bagi suatu negara untuk melakukan eksplorasi sumber-sumber alam secara legal pada wilayah tertentu; Ketiga, Fungsi Konstitutif, dalam konsep hukum internasional modern suatu negara berdaulat wajib memiliki wilayah perbatasan yang terdefiniskan dengan jelas. Yang berarti bahwa perbatasan menetapkan posisi konstitutif negara tertentu dalam komunitas internasional. Sehingga suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah itu; Keempat, Fungsi Identitas Nasional, perbatasan memiliki fungsi sebagai pengikat secara emosional terhadap komunitas yang ada dalam teritori tertentu. Kesamaan sejarah dan pengalaman secara langsung maupun tidak langsung mengikat masyarakat secara emosional untuk mengklaim identitas dan wilayah tertentu; Kelima, Fungsi Persatuan Nasional, pembentukan identitas nasional perbatasan yang terikat baik akan ikut menjaga persatuan nasional; Keenam, Fungsi Pembangunan Negara Bangsa, perbatasan sangat membantu dalam pembangunan dan pengembangan negara-bangsa karena memberikan kekuatan bagi negara untuk menentukan bagaimana sejarah bangsa dibentuk, menentukan simbol-simbol apa saja yang dapat diterima secara luas, dan menentukan identitas bersama secara normatif maupun kultural; Ketujuh, Fungsi Pencapaian Kepentingan Domestik, perbatasan memberikan batas geografis bagi negara untuk mencapai kepentingan nasional disegala bidang dan menetapkan sampai sebatas mana negara dapat melakukan segala upayanya untuk kepentingan nasionalnya.

Postur Kebijakan Perbatasan Indonesia – PNG

Bila ditinjau dari kondisinya, merujuk pada perspektif Rennie, perbatasan antara kedua negara lebih berbentuk *stable boundaries*. Hal ini dilihat dari sejarah perbatasan Indonesia dan PNG yang sejak dahulu tidak pernah mengalami gejolak konflik politik dan perubahan geopolitik yang mempengaruhi segala dimensi perbatasan diantara kedua negara ini. Walaupun dasar batas wilayah yang hanya berpegangan kepada perjanjian warisan kolonial kedua negara.

Masyarakat perbatasan di Papua seperti yang telah dibahas, merupakan masyarakat yang masih terikat dalam satu rumpun, suku dan keluarga. Jauhnya jarak dan buruknya koordinasi antara Pemerintah Pusat Indonesia dengan Pemerintah Daerahnya menjadi faktor yang mempengaruhi surutnya nilai nasionalisme terutama struktur sosial perbatasan yang terikat oleh rumpun, suku dan keluarga. Dilihat dari sisi Pemerintah PNG, struktur pemerintahan yang belum stabil yang menyebabkan buruknya pembangunan terutama di wilayah perbatasan menciptakan kondisi pembangunan sosial perbatasan belum bisa dikendalikan secara penuh, terutama stabilitas politik yang belum aman menciptakan ketergantungan masyarakat perbatasannya terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki negara tetangga. Bila ditinjau dari perspektif Martinez, bentuk perbatasan Indonesia dan PNG di Papua dalam hal ini dapat dikategorikan kedalam tipe perbatasan *interdependent borderland*. Karena dalam pelaksanaannya, masih ada masalah-masalah diperbatasan yang mengganggu stabilitas walaupun dalam bentuk yang minor.

Dalam meninjau bentuk dan permasalahan perbatasan di Papua, sengketa perbatasan menjadi penting artinya untuk melihat bagaimana bentuk dan kondisi perbatasan Indonesia dan PNG. Sengketa perbatasan yang terjadi di Papua ditinjau dari perspektif Prescott, dapat dikategorikan kedalam bentuk *functional dispute*. Dimana sengketa yang terjadi di perbatasan Papua didominasi oleh pergerakan penduduk perbatasan dan barang-barang yang tidak dijaga ketat seperti penyelundupan barang-barang terlarang dan ilegal, atau gerakan separatis yang melintas batas diluar peraturan negara baik Indonesia ataupun PNG dalam contoh kasusnya.

Kemudahan akses lintas batas di perbatasan Papua ini, merupakan salah satu dampak negatif bagi Indonesia dan PNG. Mengingat permasalahan ini bersifat mengancam keamanan kedua negara ini. Tetapi disatu sisi, hal ini juga membawa dampak positif terutama terhadap keberlangsungan hidup masyarakat didalamnya. Dalam prakteknya, kebijakan pemerintah Indonesia juga tetap memperhatikan masalah keamanan dilihat dari penempatan pasukan keamanan di perbatasan

untuk meminimalisir masalah-masalah ancaman keamanan di daerah perbatasan. Penempatan pasukan keamanan ini memiliki kemungkinan besar untuk meminimalisir gerakan-gerakan separatis (OPM) yang masih aktif di perbatasan. Kondisi ini menunjukkan bagaimana rezim perbatasan yang diterapkan Indonesia masih berupa hard-border regime, tetapi dengan permasalahan-permasalahan yang membuktikan kelonggaran terhadap keamanan yang terjadi di perbatasan dan kebijakan Indonesia yang mulai mengembangkan fokus pengelolaan perbatasan (administratif) merupakan bukti bahwa rezim keamanan perbatasan di Papua berbentuk soft-border regime. Jadi dalam hal ini sesuai dengan perspektif Wuryandari dapat dikatakan bahwa rezim perbatasan yang berlaku di perbatasan Papua ini adalah hard-border regime yang mengarah ke soft-border regime. Peneliti beralasan bahwa wacana pengelolaan perbatasan di Indonesia merupakan wacana yang baru dan rezim yang berlaku di perbatasan ini masih dalam proses penyesuaian dari rezim yang dahulunya “hard” menjadi “soft” seperti permasalahan aktifitas OPM yang surut dalam perkembangannya sehingga menurunnya tingkat ancaman yang ada di perbatasan Papua.

Kasus gerakan separatis OPM merupakan ancaman keamanan yang datang dari dalam negeri Indonesia dan dapat menyangkut keamanan di negara PNG. Dilihat dari bagaimana kebijakan Indonesia yang lebih mengutamakan kerjasama dengan PNG terutama dalam meminimalisir masalah seperti OPM ini dan kebijakannya dalam pengutamaan terhadap pengelolaan ini dapat dikatakan bahwa Indonesia mengutamakan fungsi perbatasannya sebagai persatuan nasional. Ditinjau dari ancaman OPM yang didasari oleh keinginan kelompok ini untuk memisahkan diri dari negara Indonesia merupakan salah satu dasar dalam melihat fokus pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsi persatuan nasionalnya.

Kesimpulan

Dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu: **Pertama**, Pemerintah Indonesia lebih bersifat dan bersikap preventif dengan menjaga stabilitas keamanan perbatasan kedua negara. Seperti contoh melalui kerjasama dengan PNG dalam hal keamanan perbatasan; **Kedua**, Pemerintah PNG sangat bergantung terhadap inisiatif Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang muncul di daerah perbatasan. **Ketiga**, hubungan kedua negara yang tidak dalam keadaan genjatan senjata dan lebih kooperatif; **Keempat**, masih lemahnya pengelolaan keamanan perbatasan kedua negara dilihat dari implementasi kebijakannya dilapangan. **Kelima**, kurangnya koordinasi yang baik di kedua negara ini perihal koordinasi antara masing – masing instansi yang

bersangkutan dengan pengelolaan perbatasan; **Keenam**, kurangnya lembaga yang benar – benar jelas mengatasi masalah – masalah diperbatasan; **Ketujuh**, kurang majunya pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan yang menimbulkan sulitnya koordinasi lapangan dari instansi – instansi yang berkaitan.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang diakui peneliti sebagai kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini. Pertama, postur kebijakan perbatasan Indonesia – PNG dalam perbatasan Papua ini tidak terangkum secara umum bagaimana postur kebijakan perbatasan Indonesia secara umum; Kedua, dalam penelitian ini tidak tercantum secara jelas bagaimana langkah strategis Indonesia dalam hubungan bilateralnya dengan PNG melalui perbatasan; Ketiga, karena penelitian ini ditinjau secara umum, maka menarik halnya bila adanya penelitian yang lebih lanjut seperti mengenai kejahatan lintas batas Indonesia – PNG, penyelundupan senjata dan narkoba di perbatasan dan lain-lain yang dibahas lebih mendalam dengan diharapkan penelitian ini terus berlanjut dan berkesinambungan dengan penelitian-penelitian terhadap perbatasan yang lain.

Dalam penelitian ini peneliti juga mengalami kendala-kendala terutama dalam pengumpulan data. Dengan teknik pengumpulan data studi literatur, penulis merasakan kesulitan terutama karena terbatasnya ketersediaan data mengenai perbatasan di Papua dan sulitnya akses untuk mendapatkan data yang kuat tentang perbatasan ini. Maka dengan keterbatasan ini, penulis menyarankan penelitian-penelitian selanjutnya untuk menggunakan data primer agar lebih menggambarkan kondisi perbatasan secara aktual.

Sehingga pada akhir kesimpulan ini, sampailah pada pengujian yang menunjukkan bahwa pembuktian hipotesis peneliti terhadap postur kebijakan perbatasan Indonesia – PNG tidak terbukti sepenuhnya. Dalam melihat postur kebijakan perbatasan Indonesia – PNG, diawal penelitian penulis berasumsi bahwa kondisi perbatasan Indonesia dalam keadaan *stable boundaries* dan rezim keamanan perbatasan yang berlaku di perbatasan ini dalam bentuk *soft-border regime*. Dengan alasan bahwa dalam sejarahnya perbatasan Indonesia – PNG tidak pernah mengalami konflik perbatasan dalam bentuk “*hard politik*” dan tidak pernah ada perubahan geopolitik sehinggadapat dikatakan perbatasan ini dalam bentuk yang stabil. Disatu sisi, wacana perbatasan secara umum di Indonesia tidak mengangkat permasalahan keamanan di Papua sebagai ancaman yang serius, sehingga penulis berasumsi bahwa rezim perbatasan di daerah ini kedalam *soft-border regime*. Tetapi setelah proses penelitian hingga proses analisis ternyata dihasilkan keadaan perbatasan *stable boundaries* dan rezim perbatasan yang berlaku adalah *hard-border regime* dan *soft-border regime*.

Daftar Pustaka

Buku

- Darmaputra, Rizal. *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: IDSPS Press, 2009.
- Hakim, Chappy. *Pertahanan Indonesia: Angkatan Perang Negara Kepulauan*. Jakarta: Red & White Publishing, 2011.
- Madu, L., Aryanta Nugraha, Nikolaus Loy dan Fauzan. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010..
- Nainggolan, Poltak P. *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial*. Jakarta: Tiga Putra Utama, 2004.
- Nainggolan, Poltak P. *Masalah-Masalah Perbatasan Indonesia-Papua Nugini*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009.
- Short, John R. *An Introduction To Political Geography*. London: Routledge, 1993.
- Wuryandari, Ganewati. *Keamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Jurnal

- Flynn, Stephen E., "Beyond Border Control" *Foreign Affairs*, Vol. 79 No. 6. (t.t.): 57-58. <http://www.jstor.org/stable/20049967> (diakses 3 Desember 2013).
- Kristof, Ladis K. D., "The Nature of Frontiers and Boundaries" *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 49 Nomor 3. (1959): 270-271. <http://www.jstor.org/stable/2561460> (diakses 3 Desember 2013).
- Moeldoko. "Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan: Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia" *Jurnal Pertahanan Universitas Pertahanan* (2012): 1-24. http://idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=116&Itemid=309 (diakses 23 September 2013).
- Nugroho, Riant. "Deffence Border Policy: Ten Years of Indonesia Policy Deffence Border Developments in Preserving Peace, Security and Political Integration" *Jurnal Pertahanan Universitas Pertahanan* (2011): 1-24. http://idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=64&Itemid=309 (diakses 24 September 2013).

Halaman Web

Levy, Daniel. "The Role of the Border in the Israeli-Palestine Conflict," <http://hir.harvard.edu/the-role-of-the-border-in-the-israeli-palestinian-conflict>

Minegar, Benjamin. "ICJ open hearing in Thailand-Cambodia border dispute," <http://jurist.org/paperchase/2013/04/icj-opens-hearing-in-thailand-cambodia-border-dispute.php>

Salmon, Andrew. "Korean tension: A look at the conflict," <http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/11/23/koreas.clash.explainer/index.html>

Situs Web

Milestone 1961-1968: The India-Pakistan War 1965, <http://history.state.gov/milestones/1961-1968/IndiaPakistanWar>